

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

MARDIANA

NIM : 201810380211008

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Juli 2020**

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

Diajukan oleh :

MARDIANA
201810380211008

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Jum'at 14 Agustus 2020

Pembimbing Utama

Dr. Tongat, S.H.,M.Hum

Pembimbing Pendamping

Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D



TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MARDIANA
201810380211008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Jum'at, 24 Juli 2020**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Tongat, S.H.,M.Hum**
Sekretaris : **Dr. Surya Anoraga,S.H.,M.Hum**
Penguji I : **Prof. Dr. Rahayu Hartini,**
S.H.M.Si.,M.Hum
Penguji II : **Dr. Haris, S.H., M.Hum**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Sholawat dan Salam kepada Amirul Mujahidin Rosulullah SAW, *uswatun hasanah* yang telah memberantas kebodohan di tengah ummat manusia. Setelah menempuh berbagai perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akhirnya penyusun sampai pada tahap Penulisan Tugas Akhir ini yang menjadi syarat untuk penyusun bisa meraih gelar Magister Hukum.. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, beserta jajarannya wakil rektor dan Bapak Mokh. Najih, P.hd Kaprodi MIH UMM;
2. Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping Bapak Dr. Tongat, S.H.M.Hum dan Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H.,M.Hum yang selalu meluangkan waktu, sabar membimbing penuyusun serta memberikan penyusun motivasi sehingga penuyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Kedua Orang tua, Abah tercita M.Yusuf dan Mama tercinta Hj. Jamilah yang mengasihi, mencintai, memberikan dukungan dan doa kepada penyusun ;

4. Muh. Naufal Abdul Aziz Jalaluddin, SH Suami tercinta penyusun yang selalu memberikan dukungan dan doa serta bersama sama berjuang untuk menyelesaikan studi;
5. Bapak Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat didunia dan akhirat;
6. Kawan-kawan seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dan Semoga penelitian ini ada manfaatnya, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan kita.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Surat Pernyataan	iv
Abstraksi	v
Abstract	vi
Pendahuluan	1
Tinjauan Pustaka	4
A. Tinjauan mengenai Tujuan Hukum	5
B. Tinjauan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang Undang	7
C. Tinjauan mengenai pembagian tindak pidana korupsi	10
D. Tinjauan Mengenai Delik	12
Metode Penelitian	11
Hasil dan Pembahasan	13
A. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016	13
B. Implikasi hukum penghapusan kata ‘dapat’	16
Kesimpulan dan Saran	20
Rujukan	23

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **MARDIANA**

NIM : **201810380211008**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, Juli 2020

Yang menyatakan,



MARDIANA

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

MARDIANA

Nim : 2018010380211008

Email : Mardiana96@umm.ac.id

Dr. Tongat S.H.,M.Hum.

NIDN : 0013016701

Dr. Surya Anoraga S.H.,M.Hum.

NIDN : 0012076402

ABSTRAK

“ Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No 25/PUU-XIV/2016 serta mengetahui dan memahami implikasi penghapusan kata dalam pasal 3 dan pasal 2 ayat(1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan judicial Review yang intinya menghapus Frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran delik yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Hal ini akan mempersulit proses pembuktian disebabkan harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian negara secara pasti oleh instansi yang berwenang. Selain putusan mahkamah konstitusi juga inkonsisten dengan putusan sebelumnya yaitu putusan MK No . 003/PUU--IV/2006 dan Putusan MK No. 44/PUU—XI//2013 . Perubahan terhadap kualifikasi delik dari uu tipikor harus mendapatkan perhatian serius serta harus terdapat persamaan pemahaman tentang delik korupsi berikut bagaimana hukum acaranya , maupun pengertian keuangan negara agar jangan sampai terjadi kesulitan dan perlambatan dalam penegakan tindak pidana korupsi sehingga perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan sehingga lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016, Tindak Pidana Korupsi , Frasa “Dapat”.

**LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NO. 25/PUU-XIV/2016 IN THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS
OF CORRUPTION IN INDONESIA**

MARDIANA

Nim : 2018010380211008

Email : Mardiana96@umm.ac.id

Dr. Tongat S.H.,M.Hum.

NIDN : 0013016701

Dr. Surya Anoraga S.H.,M.Hum.

NIDN : 0012076402

ABSTRACT

"The legal implications of Constitutional Court ruling No. 25/PUU-XIV/2016 in the enforcement of corruption crimes in Indonesia. This research aims to know and understand the legal considerations of the Constitutional Court in the decree No. 25/PUU-XIV/2016 as well as to know and understand the legal considerations of the Constitutional Court in the decree No. 25/PUU-XIV/2016 as well as to know and understand the implications for the elimination of words in article 3 and article 2 paragraph (1) of law No. 20 of 2001 on the amendment of Law number 31 year 1999 on the Eradication of corruption crimes by the verdict of MK No. This research is a normative legal research. It was concluded that the Constitutional Court granted a judicial Review petition which essentially removes the phrase "can" in article 2 paragraph (1) and article 3. This resulted in a delict shift that had previously been a material delict. This will complicate the process of proving proof because it must be opened in advance the state losses for sure by the competent authorities. In addition to the decision of the Constitutional Court is also inconsistent with the previous verdict, the ruling MK No. 003/PUU--IV/2006 and decision of MK No. 44/PUU — XI/2013. Changes to the Delict qualification of the criminal law must get serious attention and there should be an understanding of Delict korupsi following how the law of the show lest there is difficulty and slowdown in the enforcement of criminal acts of corruption so that it needs to be set in a regulation so as to be clearer and not to cause confusion in its implementation.

Keyword: Constitutional COURT ruling No 25/PUU-XIV/2016, corruption crime, phrase"can".

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Negara yang ada Undang Undang Dasar dalam pembukaannya di Alenia ke IV akan sulit dicapai apabila tindak pidana korupsi masih belum bisa ditangani dengan baik . Masyarakat secara umum tentu berpendapat bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak terpuji. Selain itu korupsi juga membahayakan keamanan dan stabilitas di masyarakat, juga pembangunan sosial ekonomi, politik, dan moralitas. Korupsi juga mengancam cita cita negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu maka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia harus ditangani dengan serius. Alatas mengatakan korupsi apabila terus didiamkan akan membunuh masyarakat (*destroyed the fabric of society*)¹

Penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perubahan yang cukup menjadi perdebatan dikalangan akademisi dan praktisi hukum terkait Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyaktakan kata dapat dalam pasal 3 dan Pasal 2 ayat 1 UU Tpikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD. Dimana Pasal 2 ayat 1 dan 3 Berbunyi seperti berikut di bawah ini :

Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 thn dan denda dua ratus juta paling sedikit dan paling banyak satu milyar rupiah.

Pasal 3 : Setiap Orang menyalahgunakan kewenangan, sarana, kesempatan yang ada pada dirinya karna kedudukan atau jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, suatu korporasi atau orang lain yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara dipidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat satu tahun dan dua puluh tahun paling lama dan atau denda lima puluh juta paling sedikit.

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* , Jakarta : Kompas ,2010) Hal 90

Putusan MK ini bermula dari permohonan 7 orang yang terdiri dari PNS dan pensiunan PNS yang rata rata dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor. Putusan MK menyatakan bahwa kata “dapat” merugikan perekonomian negara atau keuangan negara harus dibuktikan dengan kerugian yang pasti/myata bukan potensi kerugian nya saja .

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini menghapuskan kata “dapat” sehingga terjadi pergeseran dalam delik tipikor yang awalnya delik formil menjadi delik materiil. Sehingga perekonomian negara atau kerugian keuangan harus dihitung secara pasti. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan perubahan delik ini akan semakin mempermudah atau menyulitkan penegak hukum dalam penegakan tipikor di Indonesia.

Putusan MK ini inkonsistensi dengan putusan MK sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, MK saat itu memutuskan bahwa frasa kata “dapat” dalam pasal 3 dan pasal 2 ayat 1 menunjukkan bahwa tindak pidana itu merupakan delik formil sehingga korupsi dianggap terbukti dengan terpenuhi unsur perbuatannya tidak pada akibat nya. Karna apabila menggantungkan kepada akibat maka harus memerlukan audit yang tidak singkat karna hanya bisa dilakukakn oleh lembaga tertentu dengan demikian akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum tipikor itu sendiri. Kerja penegak hukum pun akan sangat terbebni dengan dan menyulitkan pemberantasan tipikor. Dalam sejumlah kasus seringkali jumlah kerugian negara terus bertambah dengan seiring berkembangnya kasus .

Selain itu, Terhadap Putusan MK N0 25/2016 terdapat *dissenting opinion* oleh 4 Hakim MK yaitu I dewa gede palguna, Suhartoyo, Maria Farida ,Aswanto. Menyatakan bahwa kata dapat tidaklah bertentangan dengan kepastian hukum seperti yang di dalilkan pemohon. Penghapusan kata dapat pada pasal 3 dan 2 ayat 1 justru membuat perubahan mendasar terhadap delik tipikor. Jika kerugian keuangan negara belum terjadi meskipun memperkaya diri sendiridan sifat melawan hukum suatu korporasi dan , orang lain telah terbukti maka disimpulkan belum terjadinya korupsi. Kata daapat bisa dinilai dari penjelasan

pasal 2 ayat 1 yang menyatakan kata dapat sebelum kata merugikan keuangan negara menunjukkan bahwa itu merupakan delik formil pada tindak pidana tersebut yaitu dianggap tipikor apabila dipenuhi unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan bergantung pada ditimbulkannya akibat atau tidak.

Pengaturan Pemberantasan Tipikor pada dasarnya memiliki dua makna pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan refresif. Langkah preventif yaitu terkait dengan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut, Sedangkan Langkah refresif merupakan pemberian sanksi pidana dan upaya mengembalikan kerugian negara dan perekonomian negara secara semaksimal mungkin. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dalam hal ini penyusun berupaya untuk melakukan pengkajian terhadap **Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No 25/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana implikasi hukum penghapusan kata “dapat” dalam pasal 3 dan pasal 2 ayat(1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No 25/PUU-XIV/2016?
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi penghapusan kata “Dapat” dalam pasal 3 dan pasal 2 ayat(1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan mengenai Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan mempunyai urutan pertama baru disusul oleh kemanfaatan dan kepastian hukum. meski kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan. Dibawah akan dipaparkan masing masing dari ketiga tujuan hukum tersebut.²

1. Keadilan

Keadilan itu relative tergantung subjektiv , waktu dan tempat sehingga bisa jadi adil menurut satu orang belum tentu adil juga menurut orang yang lain. Bisa ajdi disuatu tempat dianggap adil namun ditempat yang lain tidak. . Menurut cicero ada keadilan sejati yang universal, yaitu keadilan yang ditentukan oleh hukum alam ciptaan tuhan yang melahirkan akal budi yang baik. Hukum yang adil dalam artian hukum yang luas, meliputi hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Bukan hanya perundangundangan saja namun sesuai kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat.³

2. Kemanfaatan

Baik buruknya suatu hukum tergantu kepada apakah hukum tersebut nantinya akan membawa manfaat kepada masyarakat serta kebahagiaan kepada masyarakat bukan sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan apakah semua orang bias dibahagiakan? Menurut Jeremy bentham adalah sebuah kemustahilan kebahagiaan bagi individu per individu. hukum sudah dapat dikatakan baik apabila dapat membahagiakan bagian terbesar dari masyarakat. (*the great happiness of the greatestnumber*). Mayarakat akan cenderung menaati hukum apabila masyarakat mengerti kemanfaatan dari suatu hukum tersebut.⁴

² Shidarta, 2009. *moralitas profesi hukum*, refika aditama, bandung. Hal 85

³ Mukthie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia publishing, Malang,2005. Hal 31

⁴ Shidarta,Op Cit Hal86

3. Kepastian

Ciri dari hukum yaitu kepastian, terutama untuk hukum tertulis seperti undang-undang. Hukum adalah pedoman perilaku, sehingga harus memiliki sebuah kepastian, karena jika tidak terdapat kepastian maka berarti tidak ada hukum.⁵

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum yaitu mengenai dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret. pencari keadilan sebelum memulai suatu perkara ingin tahu apakah apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus. kedua adalah kepastian hukum berarti keamanan hukum yang merupakan perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim⁶

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum sesungguhnya lebih berdimensi yuridis. Kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu:

1. Tersedianya aturan hukum yang jernih, konsisten dan mudah diperoleh, dan diakui,
2. instansi penguasa menerapkan hukum secara konsisten dan tunduk pada itu.
3. Warga menyesuaikan perilaku terhadap aturan itu
4. Hakim yang mandiri dan tidak memihak
5. putusan peradilan dilaksanakan secara konkret.⁷

Tinjauan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang

1. Pengertian *Judicial Review*

Kewenangan MK tertuang dalam UUD salah satunya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenai *Judicial Review* UU terhadap UUD. *Judicial Review* merupakan upaya pengadilan untuk meninjau⁸

⁵ Ibid. hal 82

⁶ L.J van Apeldoorn, *pengantar ilmu hukum*, diterjemahkan oleh Ardi Sadino. Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.

⁷ Ibid, Hal 87

⁸ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 117

Menurut Jimmly Asshidiqie yang merupakan Ketua MK Pertama, *Judicial Review* ialah suatu peninjauan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang ditetapkan yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Merupakan langkah penerapan proses *checks and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara⁹

Judicial Review (hak uji materi) adalah wewenang peradilan dalam melakukan pengujian daya laku produk hukum yang sudah dihasilkan oleh kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif. Hal ini dilakukan sebagai upaya '*checks and balances*' dalam doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Oleh karenanya wewenang JR dilekatkan pada fungsi hakim pada subjeknya bukan pada pejabat lainnya. Apabila pengujian tersebut bukan dilakukan hakim tetapi parlemen atau legislatif maka bukan disebut JR tetapi '*legislative review*'.¹⁰

2. Kewenangan *Judicial Review*

MK merupakan lembaga yang bisa dikatakan baru di Indonesia apabila dibandingkan dengan lembaga negara lain seperti MA atau BPK. Pasca dibentuknya MK pengujian UU terhadap UUD semakin meningkat. Hal tersebut merupakan salah satu pelaksanaan dari demokrasi konstitusionalisme di negara kita yang berarti dengan dibentuknya MK diharapkan dapat menguatkan supremasi hukum serta kedaulatan rakyat. Fahaman konstitusionalisme ini berawal dari sebuah pemikiran mengenai hak konstitusional yang sudah dijamin oleh konstitusi kita yang harus ditegakkan melalui lembaga peradilan.¹¹

3. Isi Putusan

MK memberikan putusan harus berdasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan setiap dari putusan itu harus memuat : Kepala dari Putusan, identitas para pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan fakta yang

⁹ Jimmly Asshidiqie, sebagaimana dikutip oleh Fatmawati, *Hak Menguji Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 9.

¹⁰ Ibid. hlm 10

¹¹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warganegara*, Jakarta: Sinar Grafika; 2013, hlm. 113

terungkap dipersidangan, pertimbangan hokum, amar dari putusan dan tanggal dari putusan, serta Nama dari hakim yang memutus berserta nama dari paniteranya .¹² Apabila dalam putusan tidak mencapai kesepakatan bersama anatar semua hakim MK maka hal yang berbeda itu ditulis dalam putusan.¹³

Pertimbangan fakta yang di ungkap di dalam persidangan yaitu : pendirian Pemohon; keterangan dari Presiden/Pemerintah, dari DPR, atau dari DPD; lalu keterangan dari Pihak Terkait; serta alat-alat bukti¹⁴ Untuk pertimbangan yang menjadii dasar dari putusan yaitu: maksud serta tujuan permohonan; kewenangan dari Mahkamah; *legal standing* ; alasan dalam pokok permohonan. Serta Kesimpulan tentang hal yang sudah mengenai dipertimbangkan¹⁵

4. Amar Putusan

a. Ditolak

Apabila uu yang dimaksud tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka untuk amar putusannya harus menyatakan permohonan ditolak¹⁶ contoh putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan JR itu karena permohonan tidak cukup beralasan adalah di Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD N RI Tahun 1945¹⁷

b. Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Pasal 56 (1) UU MK tidak dapat diterima sebuah permohonan apabila Dalam hal MK berpendapat pemohon atau apa yang dimohonkan tidak/belum memenuhi syarat seperti yang tertuang pada pasal 50 dan 51, apabila seperti ini maka amar putusan nya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.”¹⁸

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,

¹³ RI, UU MK

¹⁴ RI, PMK

¹⁵ Ibid..psl 35

¹⁶ RI, uu MK,..., op cit., ps. 56 ayat (5)

¹⁷ MKRI, Pengujian UU JNotaris, hal. 130.

¹⁸ RI UU Mkonstitusi, ..., op cit., ps. 56 ayat (1).

c. Dikabulkan

Pasal 56 ayat (2) MK permohonan dikabulkan apabila MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan tersebut dikabulkan.¹⁹

Tinjauan mengenai pembagian tindak pidana korupsi

1. Dasar Substansi Objek Tipikor

Tindak Pidana Korupsi Murni

Tipikor murni merupakan tipikor yang substansi nya adalah yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang itu menyangkut keuangan negara, kelancaran pelaksanaan tugas , perekonomian negara , atau pekerjaan yang bersifat publik. Contoh Tipikor Murni yaitu dipasal : 3--12, 12 b, 16, 13, 15, 23 (menarik pasal, 231, 421, 220, , 422,430, , 429, KUHP).²⁰

Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tipikor mengenai perlindungan hokum atas kepentingan hukum guna lancarnya dilaksanakan tugas dari penegak hukum dalam hal upaya pelaksanaan dari tugas penegak hukum sebagai upaya dari pemberantasan tipikor. Yang dimaksud adalah pasal yang diatur dalam pasal 21,22,24.²¹

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana

Tipikor Umum

Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan tdk terbatas kepada pegawai negeri saja namun juga ke semua orang tidak terkecuali korporasi. Yang masuk dalam tindak pidana korupsi umum yaitu pasal, 5,6,7, 2,3, 21,22,24,13,15,16, , dan pasal 220 , 231 KUHP Jo pasal 23.

Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

Korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara orang yang tidak berkedudukan

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,....., Ps. 56 ayat (2).

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing, 2003. Malang, hal 16

²¹ Ibid . 17

sebagai pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana ini. Untuk tindak pidana korupsi ini ada di pasal 8,9,10,11,12,12b,23, (mengadopsi pasal 421,422,429,430, KUHP), tipikor ini dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jabatan khusus.²²

3. Atas Dasar Sumbernya

Tipikor yang Bersumber dari KUHP

- a. Tipikor dirumuskan sendiri dalam UUTipikor , rumusan berbeda dengan KUHP namun substansinya tetap sama. Contohnya adalah pasal 5-12.
- b. Tipikor yang sebenarnya ada menunjuk pasal yg ada di KUHP dan ditarik menjadi tipikor dengan merubah ancaman pidananya serta system pemidannya. Contohnya yaitu pasal 23 yang merupakan saduran dari pasal di KUHP yaitu, pasal,421,422,429,430,220,231.

Tipikor yang Oleh UU 31/1999 Jo 20/2001 dirumuskan sendiri sebagai tipikor , dalam pasal 15,16, 2,3,12b,13, 21,22,24²³

4. Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana

Tindak Pidana Korupsi Aktif/ Positif

Tipikor yang dalam rumusannya mencantumkan perbuatan aktif yang bisa juga disebut perbuatan jasmani atau perbuatan untuk mewujudkannya perlu sebuah gerakan atau bagian tubuh dari orang tersebut. Contoh dari Tipikor Aktif adalah Pasal 2-12, 12b, 13,15,16,21,22,220,231,421,422,429, dan 430.

Tindak Pidana Korupsi Pasif/Negatif

Merupakan tipikor akibat tidak berbuat aktif, seperti seharusnya seseorang melakukan hal tertentu namun pada kenyataannya tidak dilakukan, Maka ia dipersalahkan karena tindakan pasif tersebut.²⁴

5. Dasar Perekonomian Negara atau Merugikan Keuangan

Dibedakan menjadi dua yaitu yang dapat merugikan perekonomian Negara atau keuangan Negara dan yang tidak mensyaratkan adanya kerugian. Tipikor yang mensyaratkan keadaan dapat merugikan perekonomian Negara atau

²² Ibid. hal 18

²³ Ibid hal 22

²⁴ Ibid. hal 23

keuangan Negara buka delik materiil melain formil. Untuk sempurna tidak perlu adanya kerugaian secara pasti atau sudah benar ada. Sudah dikatakan dapat merugikan perekonomian atau keuangan Negara apabila menurut orang pada umumnya dapat menimbulkan kerugian. Contoh yaitu pasal , 2.3.15.Jo 2 dan 3 ²⁵

Tinjauan Mengenai Delik

1. Pengertian Delik

Menurut pendapat Simons Delik merupakan ;

“Delik merupakan tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum serta dengan sengaja/tidak oleh seseorang yang dia dapat mempertanggungjawabkan nya dan dinyatakan oleh UU sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.. Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal ada dua delik yaitu delikmateriil dan delik formiil. Adapun delik materiil menitikberatkan sesuatu pada akibat dari suatu perbuatan yang dilarang tersebut dan yang di hukumi oleh UU. , sedangkan delik formil yaitu menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan dihukumi uu ..”²⁶

2. Ruang Lingkup Delik

Cara membedakan delik Materiil dan formil dalam perumusannya adalah. Delik formil lebih focus kepada tindakan yang dilarang tersebut dan tidak bergantung atau mempersoalkan kepada akibatnya. Sedangkan delik Materil selain dari tindakannya maka harus ada akibat yang ditimbula dari perbuatan yang dilarang tersebut. Baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*). ²⁷

Delik formil

Menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang , suatu akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan yang mampu menentukan membraatkan ataukah meriingankan piidana saja. tetapi meskiipun tidakada akibat maka perbuatan itu sendiri sejatinya merupakan perbuatan yang dilarang. Contoh adalah pasal penghinaan kepada satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia 156 KUHp:

²⁵ Ibid. hal 24

²⁶ Ladeen Maarpaung, *Asaas TeoriPraktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika. 2014

²⁷ Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* hal 51

penghasutan 169 KUHP; di muka umum menyatakan perasaan kebencian, penyuapan (209,210), pemalsuan surat dan pencurian.²⁸

Delik Materiil

Menitik beratkan kepada akibat dari suatu perbuatan, delik ini dikatakan sempurna yaitu apabila akibat sudah terjadi atau dirasakan. Seandainya belum maka masih dikategorikan sebagai percobaan saja. Contoh dari delik ini yaitu pasal tentang pembakaran, penipuan, pembunuhan,²⁹

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti bahan pustaka yang disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian ini adalah normatif maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan perundang undangan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang berkaitan dengan isu/kasus yang diteliti. Sedangkan pendekatan analitis adalah dilakukan dengan menelaah makna suatu istilah hukum seperti asas, menelaah pengertian, sistem, kaidah, dan konsep yuridis dengan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer

a. UUD NRI Tahun 1945

²⁸ Chazawi, Adami *Stelsel Pidana, Tinda Pidana, Teori--Teori Pemiidanaan & Batas Berlaakunya Hukum Piidana*

²⁹ *ibid*

- b. UU Tentang MK
- c. UUTipikor No 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No 20 Tahun 2001
- d. UU Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009
- e. Putusan MK No25/PUU-XIV/2016
- f. Putusan MK N 003/PUU-IV/2006

Bahan Hukum Sekunder

Seperti , jurnal ,hasil karya ilmiah, buku, makalah, doktrin hukum, dll. Ketiga, bahan nonhukum atau bahan hukum tersier yang relevan dan berkontribusi dalam penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, mencari, mengumpulkan, mengkaji, dan melakukan pengkajian kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji. Sedangkan teknik untuk bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi literatur di berbagai tempat seperti dari jurnal, perpustakaan, artiket, dan berbagai bahan yang ditemukan diinternet yang itu berkaitan dengan topik/objek yang akan diteliti atau diangkat.

Tahapan pengumpulan bahan hukum, yaitu *editing* untuk mendapatkan kalimat yang lebih sederhana dan efektif. Lalu tahap sistemtisasi, yaitu tahap penseleksian bahan hukum lalu melakukan penggolongan dan menyusunya secara lebih sistematis. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap melakukan deskripsi, yaitu dilakukan untuk mrnggambarkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang sudah didapat lalu kemudian menganalisisnya.³¹

5. Analisa Bahan Hukum

Menganalisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif sekaligus kualittatif. Deskriptif adalah menganaliisis data melalui

³⁰ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 41.

³¹ Ibid.

pemaparan secara rinci terhadap fenomena yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Sedangkan. Kualitatif dilakukan dengan menganalisa hasil penelitian yang sudah disusun secara sistematis dengan kajian berbagai teori teori hukum yang ada. Ini dilakukan agar dapat menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini secara logis serta ilmiah dan mudah untuk dipahami..³²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum MK Dalam Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016

Hakim MK dalam memutus perkara ini memiliki pertimbangan hukum yang dengan pertimbangan tersebut menentukan amar putusan . Dibawah ini akan dipaparkan beberapa pertimbangan hukum Hakim MK dalam memutus perkara ini.

Mengenai Kewenangan Mahkamah

Permohonan yang dilakukan adalah pengujian konstitusional uu tipikor yaitu pasal 3 dan pasal 2 (1) yaitu terhadap frasa dapat dan kata atau orang lain atau suatu korporasi pada uu Tipikor terhadap UUD NRI 1945 oleh karena itu mahkamah dalam putusan ini berpendapat berwenang mengadili karena hal tersebut merupakan kewenangan mahkamah.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon mendudukan dirinya sebagai perseorangan warga indonesia. Pemohon menjelaskan secara lengkap dan aktual mengenai kerugian atas hak konstitusiionalnya yang disebabkan pasal 3 dan pasal 2 ayat (1) uu Tipikor. Dimana kemungkinan kerugian itu hilang jika mahkamah mencabut kata dapat dan atau oranglain atau suatu korporasi yang dimintakan atau di rmohonann para pemohon. Maka pendapat mahkamah pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan JR ini ke MK dan mahkamah berwenang dalam mengadilinya. Lalu selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon.

³² Ibid.

Pokok Permohonan

Pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Pasal 2 (1) uu Tpkor, Terhadap Pasal 28I ayat (4) ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat(1), Pasal 28D ayat (1)) UUD 1945.

Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) uu Tpkor menjadikan kedua pasal ini sebagai delik formil. Menurut Mahkamah praktik dilapangan terdapat penyalahgunaan pasal tersebut agar menjangkau sebanyak mungkin dugaan merugikan perekonomian atau keuangan negara, dan juga terdapat kriminalisasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang. Hal demikian dikhawatirkan dapat menyebabkan pejabat publik ragu untuk mengambil kebijakan karena takut akan dikenakan pasal tpikor.

frasa atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 dan Pasal 2 ayat(1) uu Tpkor merupakan hal yang berbeda. Karena meskipun seseorang tersebut tidak memperkaya diri sendiri tetapi apabila perbuatan Melawan hukum/ menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan ruginya negara dan orang lain atau korporasi mendapat keuntungan dan bertambah kekayaannya maka dikenakan tpikor.

Mk dalam putusannya memutus sbb :

1. Mengabulkan permohonanpara Pemohon untuksebagian;
2. Menyatakan kata dapat dalam Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) uu tipikor bertentangan dengan UU NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain danselebihnya;
4. Memerintahkan memuat Putusan ini dalam Berita NRI sebagaimana

mestinya;

Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum

UUD NRI 1954 Pasal 24(c) (1) : MK mempunyai wewenang untuk mengadili tingkat pertama hingga terakhir yang putusannya itu bersifat akhir/final untuk melakukan *Judicial Review* uu terhadap UUD, sengketa Kewenangan L. Negara, pembubaran Parpol dan Penyelesaian mengenai hasil pemilu. Karena objek permohonan JR ini adalah materi dari uu tpikor terhadap UUD maka berdasarkan landsan hukum diatas MK berwenang utk menguji uu tersebut.

Menurut MK kata 'dapat' yang di JR pemohon ini dapat menyebabkan rasa takut hingga ragu untuk mereka mengambil kebijakan sehingga berdampak kepada proses penyeleenggaraan negara. Padahal di uu tpikor kata 'dapat' pada pasal 3 dan pasal 2(1) merupakan aspek dari pencegahan kepada masyarakat luas yang berdasar agar menjadi peringatan ke semua orang agar tidak melakukan tpikor tersebut dan mencegah terjadinya potensi kerugian perekonomian negara atau keuangan negara. Kemudian kekhawatiran Mahkamah serta pemohon itu juga sudah tertuang perlingdungannya di UU Adm Pemerintah pada psal 20 dan pasal 19. Sehingga tidak akan terjadi tiba tiba adanya dalil penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara..

Sebelumnya uu tpikor ini juga sudah pernah diujikan di MK tahun 2006 saat itu permohonannya ditolak dan mendalilkan bahwa kata dapat tidak bertentangan dengan kepastian hukum. Seharusnya dengan uu yang sama dan pasal uud yang di acu juga ada yang sama MK menganggap hal ini nebis in idem. Tetapi dalam pertimbangannya mk menggang hal ini terjadi karena adanya perubahan politik hukum. Padahal korupsi sendiri tidak berubah pandang akademik nya mengenai perbuatannya yang jika terus menerus dibiarkan akan terus mengakar kuat, sehingga dalam tidak menjadi lagi kejahatan luar biasa tetapi diposisikan sebagai musuh umat manusia dikarenakan tindak pidana ini tidak memandang negara baik berkembang, maju dan sebagainya.

2. Implikasi hukum penghapusan kata ‘dapat’ dalam pasal 3 dan pasal 2 ayat (1) uu tpikor Oleh Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

Putusan MK mencabut Kata “dapat” dalam Pasal 3 dan Pasal 2 ayat UU Tpkor berimplikasi terhadap penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Diantara implikasi tersebut adalah :

Pergeseran Delik Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang menghapuskan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi, mengakibatkan delik korupsi yang semula/awalnya merupakan delik formil menjadi delik materiil yang harus mensyaratkan adanya akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung dengan nyata atau pasti.

Secara yuridis, implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah bahwa seluruh upaya menegakkan hukum tpikot terutama yang Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) (Korupsi Kerugian Negara) itu sudah harus mempunyai sebuah perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor sebelum akan dilakukan penetapan tersangka. Karena tanpa perhitungan yang real/pasti oleh auditor negara maka perbuatan yang akan disangkakan blm bisa dikategorikan sebagai tpikor .

Kata ‘dapat’ dalam uu tpikor harusnya dipandang merupakan kesatuan dari delik dalam uu tpikor. Karena perekonomian Negara atau keuangan Negara sulit ditentukan dengan pasti jumlahnya. Ketika kata ‘dapat’ dihilangkan dari uu tpikor maka penyelamatan perekonomian Negara atau kerugian Negara akan menjadi sangat tidak mungkin untuk dilakukan sebab harus menunggu tindak pidana tersebut sudah sempurna/selesai dilakukan. Ini berarti secara logika kerugian sudah terjadi. Maka seperti yang penulis jelaskan di analisa pertimbangan hokum bahwa frasa ‘dapat’ itu dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi dan kerugian Negara.

Menurut Mahkamah kata dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena merupakan delik formil yang mensyaratkan tindak pidana tersebut

dipenuhi dengan adanya potensi kerugian negara bukan kerugian negara secara nyata. Akan tetapi untuk kerugian yang terjadi dalam skala besar tentu akan menyulitkan sekali apabila harus dibuktikan secara tepat dan akurat serta dalam waktu yang memang terbatas. Juga akan menimbulkan ragu terhadap jumlah kerugian yang diajukan karena tidak secara cepat yang akan berdampak pada terbukti/tidaknya perbuatan tersebut.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Nebis in idem

UU No. 31 /1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 /2001 *nebis in idem*. Sebab, pengujian objek pasal yang sama pernah diuji dan diputus melalui MK No. 003/PUU--IV/2006 dan No 44//PUU--XI/2013.

Putusan MKNo. 003/PUU--IV/2006 dijadikan Dasar pengujian adalah UUD NRI Pasal 28 D Ayat (1). Sedangkan pada Putusan MK No44/PUU--XI/2013 yang dijadikan dasar pengujian adalah UUD NRI 1945 Pasal 28D Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (3), dan 28 I Ayat(2). Lalu Put MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menjadi dasar pengujiannya adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat (4) dan (5).

Putusan MK No44/PUU—XI//2013 juga menguji penjelasan pasal 2(1) dan juga pasal 2(1) uu tpikor. Pertimbangan Mahkamah pada putusan No 44/PUU-- XI/2013 menyatakan meskipun terjadi perbedaan dasar pengujian pada permohonan No3/2006 dengan permohonan a quo. Namun pada hakikatnya sama dengan no 003/2006 atas dasar tersebut maka permohonan itu adalah *nebis in idem*. Sehingga apabila permohonan JR yang diputus MK no 44/2013 itu *nebis in idem* itu berarti berlaku pula dengan Putusan 25/2016 .

Kata ‘dapat’ jika melihat berdasarkan penjelasan dari pasal 2(1) menyatakan kata’dapat’ sebelum kata kerugian perekonomian Negara dan keuangan Negara menunjukkan tindak pidana itu adalah delik formil, tindak pidana dianggap terjadi dengan cukup dipenuhinya unsure perbuatan yang dilarang saja bukan mengenai akibat nya. Sehingga tidaklah menimbulkan

ketidakpastian karena kata 'dapat' tidak menentukan sama sekali factor ada/tidaknya ketidakpastian hukum .

UU No 30/2014 tentang Adm Pemerintahan menjawab kekhawatiran tentang kat 'dapat' yang dianggap berpotensi menjadikan pejabat pemerintah dikenakan tpikor. Hal ini karena UU adm Pemerintahan sudah memberiikan perlindungan hukum apabiala ada pejabat pemerintah yang disangka melakukan penyalahgunaan wewenang yg itu menyebabkan kerugian keuangan Negara. Itu karema dugaan tersebut bias dilalukan pengujian lewat PTUsaha Negara.

Perubahan delik dapat mempersulit penegakan tindak pidana korupsi

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 makna pokok yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian keuangan Negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.

UU Tpikor dibagian konsideran menimbang menyebutkan bahwa tpikor merupakan perbuatan yang sangat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang menjadi penghambat pembangunan nasional oleh karenanya harus ditekan dan dihentikan agar bisa mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil berdasar pada Pancasila dan UU NRI 1945. Selain itu Tpikor selama ini membuat terhambatnya pembangunan nasional dan pertumbuhan negara. Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dikhawatirkan pemberantasan dan pengusutan tindak pid korupsi berdasarkan pasal 3 dan Pasal 2 uu Tpikor sulit untuk diselesaikan . Bahkan, hampir mustahil ada Operasi Tangkap Tangan oleh penegak hukum walaupun Pasal 3 dan Pasal 2 uu Tpikor sempurna dilakukan . Itu disebabkan Penegak hukum seperti KPK dan lainnya akan bergantung kepada hasil pemeriksaan instansi yang mempunyai wewenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang menuruut

SEMA No.4 thn 2016 ialah BPK/badan pemeriksa keuangan. dalam praktik seringkali menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi. Mulai dari “multi tafsir definisi” keuangan negara dan kerugian negara, kewenangan penghitungan kerugian negara, lambatnya proses penghitungan kerugian negara yang dinilai menghambat penanganan perkara korupsi, dan hingga belum maksimalnya eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi.

MA RI melalui (SEMA) RI No 4/2016 menyatakan instansi yang mempunyai wewenang untuk menyatakan siapa yang berwenang menyatakan ada/tidak adanya kerugian keuangan negara ialah BPK yang mana memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan untuk instansi yang lain seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai wewenang untuk pemeriksaan serta audit namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara.

Dengan telah diputusnya permohonan JR tersebut oleh Mahkamah maka menurut penulis memunculkan ketidakpastian hukum. Alasannya adalah apakah yang bias melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut adalah BPK atau BPKP atau inspektorat masing masing lembaga dan akuntan public . lalu bagaimana apabila kerugian keuangan Negara setelah dilakukan penghitungan oleh badan berwenang menjadi alasan bagi terdakwa kasus tpikor pasal 3 dan 2(1) ini agar terbebas dari pengenaan tindak pidana korupsi ? lalu bagaimana juga apabila terjadi perbedaan penghitungan antar instansi tersebut. Apakah terdakwa akan lepas dari tuntutan hukum. Serta perlu pengaturan mengenai jangka waktu penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut sehingga tidak berlarut larut dan malah menjadi celah bagi terdakwa/tersangka untuk lolos dari hukuman. Hal ini tentu juga membuat peradilan tpikor berlarut larut dan memakan waktu lama serta memperlambat proses penegakan hukum yang dilakukan..³³ contoh apabila KPK atau penegak hukum lainnya menetapkan tersangka jika sudah terdapat adanya indikasi kerugian keuangan Negara. Padahal penghitungan kerugian itu

³³Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

secara pstinya baru didapat aparat setelah dibuatnya sprindik karena penghitungan ke BPK bias dilakukan setelah adanya sprindik . apabila Penghitungan harus dilakukan terlebih dahulu agar bias menetapkan apakah ini kerugian Negara atau tidak apakah bias ditsangkakan atau tidak, maka tentu akan memperlambat proses penegakkan hokum yagng dilakukan penegak hokum baik KPK, jaksa dll.

Pasca diputuskan permohonan JR yang dituangkan dalam Putusan MK No 25/PUU--XIV/2016 yang merubah delik menjadi delik materiil tentu menjadi tantangan besar dan berat bagi BPK dan instansi yang mempunyai wewenang untuk menghitung kerugian keuangan Negara atas permintaan para aparat penegak hokum serta menjadi instansi yang berwenang menngumumkan terjadi atau tidaknya kerugian keuangan Negara yang telah dihitung BPKP, SKPD atau inspektorat instansi sesuai dengan Sema 4/2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Korupsi sendiri tidak berubah pandang akademik nya mengenai perbuatannya yang jika terus menerus dibiarkan akan terus mengakar kuat,sehingga dalam tidak menjadi lagi kejahatan luar biasa tetapi diposisikan sebagai musuh umat manusia dikarenakan tindak pidana ini tidak memandang negara baik berkembang, maju dan sebagainya.

Pengaturan mengenai Pemberantasan Tpikor mempunyai dua makna pokok, yaitu sebagai langkah refresif dan preventif. Langkah preventif yaitu terkait dengan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut, Sedangkan Langkah refresif merupakan pemberian sanksi pidana dan upaya mengembalikan kerugian negara dan perekonomian negara secara semaksimal mungkin.

Putusan MKNo. 25/PUU--XIV/2016 yang menghapuskan kata “dapat” dalam pasal 3 dan pasal 2ayat (1) UU Tpikor menyebabkan delik korupsi yang selama ini ialah delik formil berubah menjadi delik materiil yang mensyaratkan

ada akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

UU Tipikor *nebis in idem* karena , pengujian objek pasal yang sama pernah diuji juga kemudian diputus dalam putusan MK No. 003//PUU--IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 44//PUU--XI/2013.

Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi No 25//PUU—XI/2016 di khawatirkan pemberantasan tipikor yang berdasar pasal 3 dan pasal 2(1) akan lebih sulit dilakukan mungkin juga mustahil akan tetap adanya OTT . karena penegak hukum sangat bergantung kepada badan pemeriksa keuaangan/BPK yang didalam praktik akan menimbulkan persoalan yang pasti akan mempengaruhi penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Mulai dari adanya “multi tafsir definisi” keuangan negara dan kerugian negara, kewenangan penghitungan kerugian negara, lambatnya proses penghitungan kerugian negara yang dinilai menghambat penanganan perkara korupsi, dan hingga belum maksimalnya eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi.

Saran

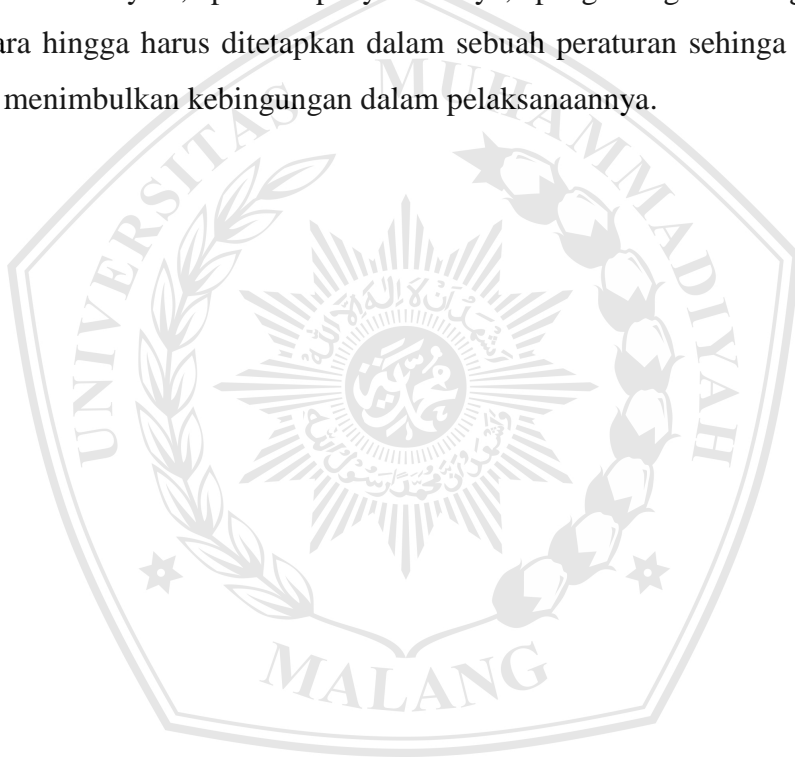
Pengaturan mengenai pemberantasan tipikor mempunyai 2 (dua) makna yang pokok: sebagai langkah represif dan preventif. Langkah preventif berkaitan dengan pemberantasan tipikor . diharapkan masyarakat untuk tidak melakukan itu. Langkah represif yaitu pemberian sanksi pidana untuk sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.

Penggunaan kata “dapat” pada UU Tipikor menyebabkan deliknya menjadi delik formil yang tidak mensyaratkan adanya kerugian negara secara nyata atau pasti hal ini dimaksudkan agar upaya preventif terjadi. Sehingga dengan menghilangkan kata dapat tersebut maka akan otomatis menghilangkan kehendak dan maksud pembuat undang undang itu sendiri.

Perlu juga kejelasan terhadap apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara, apakah yang dimaksud kerugian keuangan negara tersebut

hanyalah kerugaian dalam arti rugi secara keuangan. Ataukah kerugian seperti kerusakan SDA atau kerusakan yang bersifat lainnya bisa/tidak untuk dikategorikan kerugian negara. karena pengertian kerugian negara sendiri bermacam macam di berbagai UU sehingga tidak adanya kesesuaian sehingga menimbulkan kebingungan.

Perubahan terhadap kualifikasii delik dari uu tipikor harus mendapatkan perhatian seriius di antara para praktisi maupun akademisi hukum. Harus adanya kesamaan pemahaman mengenai delik korupsi berikut unsur delik, hukum acaranya , proses penyidikannya, penghitungan kerugian keuangan negaara hingga harus ditetapkan dalam sebuah peraturan sehinga lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.



Rujukan

Buku

Adami Chazawi, 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing.

J.B. Daliyo, 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.

Asshidiqie, Jimmly. 2006. sebagaimana dikutip oleh Fatmawati, *Hak Menguji Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Pantja Astawa, I Gede dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Laden Marpaung, 2014. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika.

Maruarar Siahaan, 2008. *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..

Mukthie Fajar, 2005. *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia publishing, Malang.

Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Progresif", (Jakarta: Kompas, 2010).

Shidarta, 2009. *moralitas profesi hukum*, refika aditama, bandung.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. 1990. Cet Ke-2 Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang.

Sudikno mertokusumo, 1991. *mengenal hukum (suatu pengantar)*. Ed.3. Yogyakarta: liberty .

Jurnal

Jurnal Konstitusi, **Fatkhurohman**, , Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

DIPONEGORO LAW JOURNAL, KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017. Raymel B. Kaseger, PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Konstitusi, *Vol. I, No. 1, November 2012*, H. M. Erham Amin, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Undang Undang

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006